



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 100.3.3.2/3 / TAHUN 2025

TENTANG

BESARAN UANG PERSEDIAAN TUNAI DAN UANG PERSEDIAAN
KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH SERTA GANTI UANG
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Tunai - UP KKPD dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 harus sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (16) Peraturan Bupati Katingan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Besaran Uang Persediaan dan Mekanisme Ganti Uang Perangkat Daerah menyatakan besaran Uang Persediaan (UP) setiap Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Katingan tentang Besaran Uang Persediaan Tunai dan Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah serta Ganti Uang Perangkat Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 83);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 99);
10. Peraturan Bupati Katingan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024 Nomor 781);
11. Peraturan Bupati Katingan Nomor 54 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024 Nomor 822);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN TUNAI DAN UANG PERSEDIAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH SERTA GANTI UANG PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Besaran Uang Persediaan (UP) Tunai dan Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) serta Ganti Uang (GU) Perangkat Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah masing-masing Tahun Anggaran 2025;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 2 Januari 2025



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta :
u.p. a. Inspektur Jenderal;
b. Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta :
u.p. Direktur Jenderal Dana Perimbangan Keuangan;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta:
u.p. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksaan Keuangan;
4. Inspektur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan :
u.p. Kepala Bagian Hukum;
7. Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan;
8. Semua Kepala Perangkat Daerah di Kabupaten Katingan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 100-3.3.2/3 / TAHUN 2025
TENTANG
BESARAN UANG PERSEDIAAN TUNAI DAN UANG PERSEDIAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH SERTA GANTI UANG PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2025

TABEL PERHITUNGAN UANG PERSEDIAAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU MURNI	CARA PEMBAYARAN						KET
			BEL OPERASI, BEL. MODAL & LS	UP 1 TAHUN	GU-UP		TUNAI (70%)	KKPD (30%)	
					Rp	PEMBULATAN			
1	2	3	4	5 (3-4)	6 (5/ 12)	7	8	9	10
1	Dinas Pendidikan	354,732,143,360.00	344,492,582,064.00	10,239,561,296.00	853,296,774.67	850,000,000.00	595,000,000.00	255,000,000.00	12 bulan
2	Dinas Kesehatan	246,106,593,685.00	211,173,110,282.00	34,933,483,403.00	2,911,123,616.92	2,910,000,000.00	2,037,000,000.00	873,000,000.00	12 bulan
3	RSUD Mas Amsyar	60,243,583,029.00	54,094,973,429.00	6,148,609,600.00	512,384,133.33	512,300,000.00	-	-	12 bulan
4	RSUD Pratama Tumbang Samba	6,314,419,000.00	2,654,353,827.15	3,660,065,172.85	305,005,431.07	300,000,000.00	-	-	12 bulan
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	135,804,972,301.00	123,775,959,116.00	12,029,013,185.00	1,002,417,765.42	1,002,000,000.00	701,400,000.00	300,600,000.00	12 bulan
6	Dinas Perumahan, Kawasan, Pemukiman dan Pertanahan	24,289,424,082.00	20,847,484,160.00	3,441,939,922.00	286,828,326.83	286,800,000.00	-	-	12 bulan
7	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian & Pengembangan	13,113,264,438.00	8,760,950,536.00	4,352,313,902.00	362,692,825.17	362,000,000.00	-	-	12 bulan
8	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik & Persandian	14,406,994,572.00	10,760,543,762.00	3,646,450,810.00	303,870,900.83	303,870,900.00	-	-	12 bulan
9	Dinas Lingkungan Hidup	21,421,516,177.00	13,604,034,715.00	7,817,481,462.00	651,456,788.50	651,450,000.00	-	-	12 bulan
10	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	9,228,467,755	6,743,161,669.00	2,485,306,086.00	207,108,840.50	200,000,000.00	-	-	12 bulan
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB	13,667,947,607.00	8,696,552,748.00	4,971,394,859.00	414,282,904.92	414,000,000.00	-	-	12 bulan
12	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	13,022,335,934.00	8,506,179,026.00	4,516,156,908.00	376,346,409.00	376,346,000.00	-	-	12 bulan
13	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	19,094,051,344.00	14,241,801,148.00	4,852,250,196.00	404,354,183.00	404,000,000.00	-	-	12 bulan
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10,895,633,642.00	8,920,205,455.00	1,975,428,187.00	164,619,015.58	164,600,000.00	-	-	12 bulan
15	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	25,384,364,615.00	20,042,510,977.00	5,341,853,638.00	445,154,469.83	445,000,000.00	-	-	12 bulan
16	Sekretariat Daerah	72,882,037,945.00	56,948,996,690.00	15,933,041,255.00	1,327,753,437.92	1,300,000,000.00	910,000,000.00	390,000,000.00	12 bulan
17	Sekretariat DPRD	53,806,525,783.00	25,757,958,930.00	28,048,566,853.00	2,337,380,571.08	2,337,380,000.00	-	-	12 bulan
18	Badan Keuangan dan Aset Daerah	348,602,834,062.00	342,017,697,484.00	6,585,136,578.00	548,761,381.50	548,700,000.00	384,090,000.00	164,610,000.00	12 bulan
19	Badan Pendapatan Daerah	12,238,781,297.00	7,707,151,516.00	4,531,629,781.00	377,635,815.08	377,600,000.00	-	-	12 bulan

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU MURNI	CARA PEMBAYARAN						KET
			BEL OPERASI, BEL. MODAL & LS	UP 1 TAHUN	GU-UP		TUNAI (70%)	KKPD (30%)	
					Rp	PEMBULATAN			
1	2	3	4	5 (3-4)	6 (5 / 12)	7	8	9	10
20	Inspektorat	19,515,686,305.00	10,933,765,601.00	8,581,920,704.00	715,160,058.67	715,160,000.00	500,612,000.00	214,548,000.00	12 bulan
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12,895,622,242.00	8,059,662,377.00	4,835,959,865.00	402,996,655.42	402,500,000.00	-	-	12 bulan
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9,254,527,166.00	5,881,793,873.00	3,372,733,293.00	281,061,107.75	281,000,000.00	-	-	12 bulan
23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9,638,987,473.00	6,258,255,009.00	3,380,732,464.00	281,727,705.33	281,700,000.00	-	-	12 bulan
24	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	17,115,837,856.00	13,504,185,149.83	3,611,652,706.17	300,971,058.85	300,000,000.00	-	-	12 bulan
25	Dinas Perhubungan dan Perikanan	16,180,949,890.00	11,770,668,459.00	4,410,281,431.00	367,523,452.58	367,500,000.00	-	-	12 bulan
26	Dinas Sosial	10,704,329,606.00	6,240,082,915.00	4,464,246,691.00	372,020,557.58	370,000,000.00	-	-	12 bulan
27	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	10,523,524,765.00	6,565,053,871.02	3,958,470,893.98	329,872,574.50	329,800,000.00	-	-	12 bulan
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10,958,012,559.00	8,449,720,980.00	2,508,291,579.00	209,024,298.25	200,000,000.00	-	-	12 bulan
29	Kecamatan Katingan Kuala	6,133,071,000.00	4,187,440,372.00	1,945,630,628.00	162,135,885.67	162,100,000.00	-	-	12 bulan
30	Kecamatan Kamipang	3,872,073,000.00	2,405,018,886.00	1,467,054,114.00	122,254,509.50	122,200,000.00	-	-	12 bulan
31	Kecamatan Tasik Payawan	3,805,226,000.00	2,641,437,275.00	1,163,788,725.00	96,982,393.75	96,900,000.00	-	-	12 bulan
32	Kecamatan Katingan Hilir	7,448,461,000.00	5,541,057,826.00	1,907,403,174.00	158,950,264.50	158,950,000.00	-	-	12 bulan
33	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	5,660,012,000.00	4,111,036,749.00	1,548,975,251.00	129,081,270.92	129,000,000.00	-	-	12 bulan
34	Kecamatan Pulau Malan	4,193,552,000.00	2,937,141,329.00	1,256,410,671.00	104,700,889.25	104,700,800.00	-	-	12 bulan
35	Kecamatan Katingan Tengah	5,990,513,000.00	4,284,261,711.00	1,706,251,289.00	142,187,607.42	142,187,000.00	-	-	12 bulan
36	Kecamatan Sanaman Mantikei	4,129,275,000.00	2,335,274,819.00	1,794,000,181.00	149,500,015.08	149,490,000.00	-	-	12 bulan
37	Kecamatan Marikit	3,997,846,000.00	2,081,845,184.48	1,916,000,815.52	159,666,734.63	159,600,000.00	-	-	12 bulan
38	Kecamatan Katingan Hulu	4,769,123,000.00	3,344,934,209.00	1,424,188,791.00	118,682,399.25	118,682,000.00	-	-	12 bulan
39	Kecamatan Mendawai	3,502,275,000.00	2,070,677,240.00	1,431,597,760.00	119,299,813.33	119,000,000.00	-	-	12 bulan
40	Kecamatan Bukit Raya	3,102,682,000.00	1,609,768,238.00	1,492,913,762.00	124,409,480.17	124,400,000.00	-	-	12 bulan
41	Kecamatan Petak Malai	3,056,157,000.00	1,589,601,485.00	1,466,555,515.00	122,212,959.58	122,200,000.00	-	-	12 bulan
	JUMLAH	1,631,703,634,490.00	1,406,548,891,092.48	225,154,743,397.52	18,762,895,283.13	18,703,116,700.00	5,128,102,000.00	2,197,758,000.00	

Total Pagu OPD 1,631,703,634,490.00
 Belanja Operasi, Belanja Modal dan LS 1,406,548,891,092.48
 UP 1 Tahun 225,154,743,397.52
 Besaran GU-UP 18,762,895,283.13
 UP Pembulatan 18,703,116,700.00
 Tunai 70% 5,128,102,000.00
 KKPD 30% 2,197,758,000.00

